

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintah dan hubungan keuangan, sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (PP Nomor 58 Tahun 2005). Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan umum yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Penyusunan Kebijakan Umum APBD pada dasarnya merupakan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan pemerintah.

Penganggaran merupakan suatu proses yang cukup rumit pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah kota. Karakteristik tujuan

anggaran yang terdiri dari partisipasi dalam penyusunan anggaran, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, serta kesulitan tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh lemah terhadap sikap aparat dalam menilai kinerja pemda kota palangkaraya (masiyah kholmi, mia milayanti 2012), sedangkan tekanan dari masyarakat agar pemerintah daerah meningkatkan kinerja dan akuntabilitas demi terwujudnya pemerintahan yang baik mengharuskan pemerintah daerah harus membenahi diri untuk merespon perubahan yang diinginkan, termasuk didalamnya satuan kerja perangkat daerah sebagai unit kerja yang mempunyai kegiatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran agar dalam pelaksanaannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi sektor publik memerlukan anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya. Menurut mardiasmo (2002) proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan melibatkan berbagai pihak baik tingkat atas maupun tingkat bawah yang mempunyai kuasa dalam mempersiapkan dan mengevaluasi tujuan anggaran, dimana anggaran selalu digunakan sebagai tolak ukur terbaik kinerja manajer. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Coryanata, 2007).

Organisasi merupakan suatu tempat dimana terdapat kerjasama dua orang atau lebih yang mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengerjakan suatu usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi juga merupakan perpaduan secara sistematis dari bagian-bagian yang saling berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, pengawasan dalam usaha mencapai tujuan. Sebagai tempat melakukan pekerjaan setiap orang harus jelas tugas dan tanggungjawabnya., hubungan dan tata kerjanya. organisasi sebagai tempat atau wadah lebih bersifat statis sedangkan sebagai proses lebih bersifat dinamis karena dinamikanya, aktivitasnya, tindakan dan hubungan yang terjadi dalam organisasi baik dalam organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Usaha untuk mewujudkan tujuan organisasi diperlukan pegawai yang berdaya guna yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam melaksanakan pekerjaannya, namun untuk mencapai hasil yang optimal diperlukan adanya suatu pengendalian sehingga akan tercapai suatu kesatuan arah gerak kegiatan dan tindakan pegawai. Pengendalian merupakan salah satu dari fungsi manajemen, pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana, dengan adanya pengendalian diharapkan sumber daya manusia yang merupakan factor utama

penggerak didalam organisasi dapat memberikan keuntungan yang maksimal bagi organisasi dimana ia bekerja.

Pengelolaan pemerintah daerah secara akuntabilitas, tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2005), bahwa wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979). Namun demikian, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja belum tentu sesuai yang diharapkan dalam pencapaian tujuan. Oleh karena itu, efektifitas sistem pengendalian intern pada suatu organisasi perlu ditingkatkan agar pengendalian baik pengendalian keuangan maupun pengendalian kinerja dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Adanya sikap positif dari aparat pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja sehingga para pegawai semakin loyal pada pekerjaannya dan akan memberikan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut sehingga proses penganggaran dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dalam proses penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi dalam ruang lingkup internal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya masing-masing. Mardiasmo (2002) menjelaskan secara lebih luas

tentang fungsi utama anggaran sektor publik, yaitu sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi, alat menciptakan ruang publik sedangkan kenis, 1979) bahwa karakteristik anggaran meliputi sebagai partisipasi anggaran, berbagi informasi, kejelasan tujuan, kecukupan anggaran dan umpan balik anggaran.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan mengenai karakteristik tujuan anggaran antara lain Munawar, dkk (2006), penelitian ini menemukan bahwa karakteristik tujuan anggaran secara simultan berpengaruh secara positif terhadap perilaku, sikap, dan kinerja aparat Pemerintah Kota Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan kinerja aparat Pemerintah Kota Kupang dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran telah mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu keikutsertaan staf dan masyarakat baik dalam menyusun, melaksanakan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Laoli (2011) menemukan bahwa partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan pencapaian tujuan anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Nias, evaluasi anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah daerah Kabupaten Nias. Karakteristik tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah daerah Kabupaten Nias.

Penelitian mengenai pengaruh karakteristik anggaran telah banyak dilakukan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Munawar (2006). Peneliti tidak melakukan pendekatan kualitatif seperti yang dilakukan

oleh Munawar (2006) tetapi hanya dengan pendekatan kuantitatif. maksudnya penelitian ini mendasarkan hasil penelitian pada perhitungan-perhitungan matematis yg kemudian memberikan gambaran atas suatu fenomena kasus yg diajukan dalam penelitian. Data angka yg dihasilkan menjadi acuan atau parameter tingkat atau level yg telah ditentukan sebelumnya. Cara-cara yg digunakan bisa berupa tes (pra maupun pasca) yg kemudian melalui berbagai proses uji validitas data.

Penelitian ini dilakukan pada Aparat Pemerintah Kota Tanjung Balai karena Pemerintahan sebagai salah satu organisasi Publik yang menjalankan otonomi daerah sesuai aturan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, merupakan komitmen pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta harkat dan martabat masyarakat Tanjung Balai. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka dituntut suatu proses perencanaan program dan anggaran yang baik serta didukung oleh kualitas kinerja aparat pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari ketersediaan dana yang memadai, sehingga diharapkan terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah daerah Kota Tanjung Balai merupakan organisasi sektor publik yang menjalankan otonomi daerah sesuai aturan dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, merupakan komitmen

pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan serta harkat dan martabat masyarakat Tanjung Balai. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka dituntut suatu proses perencanaan program dan anggaran yang baik serta didukung oleh kualitas kinerja aparat pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari ketersediaan dana yang memadai, sehingga diharapkan terciptanya kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti termotivasi untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Pengendalian Keuangan Pada Pemerintahan Kota Tanjung Balai ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi identifikasi pada penelitian ini yaitu :

1. Apakah karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengendalian keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai?
2. Seberapa besar pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja pengendalian keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalah pahaman terhadap permasalahan yang akan di teliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu penulis membatasi masalah hanya pada partisipasi anggaran, berbagi informasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, dan kecukupan anggaran guna mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja pengendalian keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Apakah partisipasi anggaran, berbagi informasi, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, kecukupan anggaran berpengaruh terhadap kinerja pengendalian keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui partisipasi anggaran, berbagi informasi, kejelasan anggaran, umpan balik anggaran, kecukupan anggaran, berpengaruh terhadap kinerja pengendalian keuangan Pemerintah Kota Tanjung Balai.

1.6 Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian ini dapat dipenuhi, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, untuk menambah ilmu pengetahuan baik dalam penulisan karya ilmiah maupun dalam hal lapangan yang akan di serap pada penelitian.
2. Bagi Instansi Pemerintah, diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan pengendalian keuangan yang baik, khususnya akan meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah untuk mencapai tujuan anggaran yang diinginkan.
3. Bagi para akademisi dan kalangan
4. umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.